



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dengan indikator kinerja, antara lain :

1. Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (Persen);
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (Persen);
3. Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (Persen);
4. Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (Persen) ;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (perda);
6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (perbup);
7. Jumlah sertifikat aset tetap tanah (sertifikat) ;





Tabel VI.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Program	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Rancangan APBD/APBD-P Kabupaten Banggai	Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD/APBD-P	Ketepatan Penyusunan Rancangan yaitu Tanggal Penyampaian RAPBD, Tanggal Penetapan PERDA APBD sesuai Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tanggal Penyampaian RAPBD s/d Tanggal Penandatanganan PERDA APBD Kurang atau Sama dengan 60 Hari Kerja itu Berarti Berkualitas, Lebih dari 60 Hari Tidak Berkualitas	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen APBD / APBD-P
		Rasio Ketepatan Realisasi Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan	Ketepatan Proyeksi adalah Tepatnya Dalam Menentukan Alokasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan $\frac{\text{Ketepatan Realisasi Proyeksi Pendapatan}}{\text{Total Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Ketepatan Realisasi Proyeksi Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$ $\frac{\text{Ketepatan Realisasi Proyeksi Pembiayaan}}{\text{Total Anggaran Pembiayaan}} \times 100\%$	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
2	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Keuangan Daerah	Indeks Kepuasan OPD	Indeks Kepuasan OPD adalah Ukuran Kepuasan OPD terhadap Pelayanan yang diberikan oleh BPKAD Sesuai dengan Permenpan No.16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD
		Persentase Penyelesaian SP2D yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk, setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh Kuasa BUD. SP2D dapat diterbitkan jika : Pengeluaran yang diminta tidak melebihi Pagu Anggaran DPA-SKPD dan SPD yang tersedia mencukupi, didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Waktu Penerbitan SP2D diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima, apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPM diterima $\frac{\text{Jumlah SP2D yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Seluruh SP2D yang Terbit}} \times 100\%$		





3	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kab. Banggai yang Memiliki Bukti Kepemilikan	Barang Milik Daerah adalah Barang Daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh melalui APBD maupun melalui perorangan yang sah $\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Memiliki Bukti Kepemilikan}}{\text{Jumlah Seluruh Barang Milik Daerah}} \times 100\%$	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Barang Milik Daerah
		Persentase Kesesuaian Buku Induk Inventaris Kabupaten	Buku Induk Inventaris Kabupaten adalah Buku tempat mencatat semua barang inventaris yang sudah dimiliki dan sekaligus merupakan sumber informasi mengenai segala macam data yang diperlukan tentang barang-barang inventaris $\frac{\text{Jumlah Barang yang Sesuai/Berkesesuaian}}{\text{Jumlah Seluruh Barang Milik Daerah}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Barang Daerah	
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang menjadi Kategori / Nilai yang diperoleh	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD dan Dokumen LKPD

